

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini yang menyajikan tinjauan pustaka yang menjadi dasar bagi kerangka pemikiran dan hipotesis. Tinjauan pustaka berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai konsep-konsep dasar terkait variabel-variabel yang akan diteliti dan didukung oleh studi-studi sebelumnya. Selanjutnya di bagian ini, penulis juga akan menjelaskan kerangka pemikiran yang menyoroti hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Kemudian, diikuti dengan hipotesis yang diajukan.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah tertentu. Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan semua produk akhir dan pelayanan yang ada di wilayah tersebut, serta menghimpun nilai dari semua industri ekonomi dan sektor jasa yang beroperasi di area tersebut (Khairunnida & Utomo, 2024). Indikator untuk menilai kemajuan ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi dari daerah tersebut. Ekonomi suatu wilayah akan meningkat dari tahun ke tahun karena adanya tambahan dalam faktor produksi. Selain faktor produksi, jumlah tenaga kerja yang tersedia juga akan bertambah setiap tahunnya, sehingga jika dikelola dengan baik, ini akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Sadono, 2000) dalam (Imbran, 2023).

Ada beberapa instrumen untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat nasional adalah total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam setahun dan diukur dengan harga pasar.

2. Produk Domestik Bruto Per Kapita

Produk domestik bruto juga dapat berfungsi sebagai indikator pertumbuhan yang lebih akurat dalam menggambarkan kesejahteraan penduduk di tingkat daerah.

Pada penghitungan PDRB, terdapat dua jenis harga yang bisa digunakan, yaitu PDRB dengan harga berlaku dan PDRB dengan harga konstan.

1. PDRB dengan harga berlaku (ADHB) diperoleh dari nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. PDRB berdasarkan harga berlaku bertujuan untuk memahami struktur ekonomi di suatu daerah.
2. PDRB harga konstan (ADHK) diperoleh dari nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga dari tahun tertentu yang dijadikan sebagai acuan atau dasar. PDRB konstan berguna untuk menganalisis kemampuan sumber daya di suatu daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun (Badan Pusat Statistik, 2024).

Teori pertumbuhan ekonomi membahas hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan hasil jangka panjang sehingga mendorong

pertumbuhan. Teori pertumbuhan perlu mencakup pemahaman tentang total GDP dan pertumbuhan penduduk untuk menjelaskan output per kapita. Sementara itu, perspektif jangka panjang menguraikan pola pertumbuhan yang berlangsung dalam periode yang lebih lama, setidaknya 10 tahun (Budiono, 1982) dalam (Arafah *et al.*, 2021).

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut Adam Smith, elemen penting dari sistem produksi meliputi SDA, SDM, dan modal yang tersedia. Teori ini menyatakan bahwa jumlah SDA yang ada menjadi batas tertinggi pertumbuhan ekonomi, di mana SDA belum dimanfaatkan secara optimal sehingga peningkatan produksi bergantung pada SDM dan modal. SDA akan sepenuhnya digunakan jika hasil terus meningkat (Budiono, 1982) dalam (Arafah *et al.*, 2021).

Unsur jumlah penduduk dalam teori ini dianggap pasif dan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada. Peningkatan jumlah penduduk akan menghasilkan spesialisasi dalam pekerjaan yang dapat meningkatkan produktivitas. Di sisi lain, menurut Smith, stok modal memiliki dua dampak terhadap total output, yakni dampak langsung berupa penambahan modal dan dampak tidak langsung melalui peningkatan produktivitas akibat spesialisasi dan pembagian kerja serta efisiensi pekerja.

Teori Klasik yang dikemukakan oleh Smith ditransformasikan oleh David Ricardo, yang berpendapat bahwa dengan terbatasnya lahan, pertumbuhan populasi akan menurunkan produk marjinal. Keterbatasan lahan juga akan

menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi, namun masih ada peluang untuk meningkatkan ekonomi melalui kemajuan teknologi (Budiono, 1982).

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori ini dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan yang kemudian dikenal sebagai model pertumbuhan Solow-Swan. Fokus dari teori ini adalah pada pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, perkembangan teknologi, dan output yang saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Menurut Solow, pertumbuhan akan berlangsung jika terdapat modal, peningkatan jumlah penduduk, dan kemajuan teknologi, meskipun teknologi masih dipandang sebagai faktor eksogen (Arsyad, 2010:88) dalam (Kurniawan & Imaningsih, 2025).

Dengan cara ini, fungsi produksi bisa dinyatakan dalam rumus sebagai berikut:

$$Y = F(K, L \times E)$$

Menunjukkan bahwa total output Y dipengaruhi oleh total unit modal K dan jumlah tenaga kerja yang efektif $L \times E$. Ini berarti bahwa peningkatan efisiensi tenaga kerja E akan sejalan dengan penambahan angkatan kerja L . Sementara itu, tabungan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun penurunan pengembalian modal akan memicu tercapainya ekonomi yang stabil melalui kemajuan teknologi, yang dikenal sebagai eksogen (Mankiw, 2007).

Teori pertumbuhan endogen diperkenalkan oleh Paul M Romer pada tahun 1986 dan Robert Lucas pada tahun 1988 sebagai respons terhadap teori pertumbuhan neo-klasik yang dianggap tidak mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara memadai. Pertumbuhan yang berkelanjutan

dihasilkan dari inovasi teknologi yang dianggap sebagai faktor eksternal dan masih bersifat asumsi (Residu Solow). Teknologi ini muncul secara acak dalam proses produksi tanpa adanya persaingan, dan setiap negara memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi dengan biaya yang rendah atau bahkan tanpa biaya sama sekali.

Dengan demikian, teori pertumbuhan endogen menyoroti kesalahan dalam spesifikasi model neo-klasik, karena hanya memperhitungkan mesin produksi sebagai bentuk kapital. Selain itu, teori ini kurang memperhatikan pentingnya proses *learning-by-doing* yang meningkat seiring dengan kemunculan produk baru yang dihasilkan dari pengetahuan dan ide-ide baru, aliran modal, atau saluran-transmisi lainnya dalam ekonomi (King, 1990). Teori pertumbuhan endogen terbagi menjadi dua aliran pemikiran, yaitu perilaku *learning-by-doing* dan pengenalan inovasi serta penemuan baru dalam ekonomi yang berfungsi sebagai pendorong produktivitas. Elemen kunci untuk peningkatan produktivitas ekonomi dalam kedua aliran ini adalah sumber daya manusia (Priyambodo, 1995:68).

Romer (1986) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sumber daya manusia melalui perkembangan teknologi, dengan fungsi produksi agregat sebagai berikut: $Y = F(A, K, L, H)$. Dalam hal ini, A merujuk pada kemajuan teknologi, K adalah modal fisik, H mencakup sumber daya manusia yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan, sementara L merupakan tenaga kerja. Model untuk tahap pertumbuhan pendapatan per kapita dalam suatu ekonomi adalah: $g-n = \beta / [1 - \alpha + \beta]$. Di sini, g menunjukkan laju pertumbuhan

output, n adalah tingkat pertumbuhan populasi, β mencerminkan perubahan teknologi, dan α adalah elastisitas output modal.

Teori ini memiliki tiga komponen utama, yaitu: (1) Adanya evolusi teknologi yang bersifat internal melalui akumulasi pengetahuan. (2) Penciptaan gagasan-gagasan baru oleh perusahaan yang muncul dari mekanisme penyebaran pengetahuan. (3) Produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh elemen produksi pengetahuan akan terus berkembang tanpa batas.

2.1.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Pendidikan merupakan aspek yang paling penting dalam hidup, ini berarti setiap orang berhak untuk mengalaminya dan diharap dapat terus berkembang di dalamnya. Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh pengetahuan, baik dari jalur pendidikan formal maupun nonformal. Seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa: "setiap warga negara berhak atas pendidikan. " Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah upaya yang dilakukan dengan sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan potensi serta kemampuan anak, agar dapat bermanfaat bagi kehidupannya sebagai individu dan sebagai warga negara di masa depan (Assa *et al.*, 2022).

Rata-rata durasi pendidikan menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh populasi dengan rentang usia tertentu untuk menjalani pendidikan formal. Pendidikan dipandang sebagai faktor penting dalam meningkatkan kualitas manusia dan memperluas peluang kerja. Peningkatan rata-rata durasi pendidikan sering kali membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang

pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Rata-rata durasi pendidikan mencerminkan kualitas sumber daya manusia, kemudahan akses pendidikan, kesempatan yang ada, serta tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Rata-rata lama sekolah adalah salah satu ukuran dalam bidang pendidikan yang menilai berapa tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh individu berusia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah dapat menggambarkan kualitas tenaga kerja, akses dan peluang pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat (Meilinna *et al.*, 2023).

Konsep *Human Capital* pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Theodore Schultz (1961) dan dikembangkan lebih oleh Gary Becker (1964), yang menggambarkan bahwa investasi untuk pendidikan dan kesehatan bukan hanya sekadar konsumsi, melainkan sebuah investasi yang memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang. Orang yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi biasanya memiliki produktivitas yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih besar, dan lebih banyak kesempatan kerja dibandingkan dengan orang yang memiliki pendidikan rendah.

Menurut penjelasan Schultz (1961), pertumbuhan output ekonomi tidak hanya tergantung pada peningkatan jumlah tenaga kerja atau modal fisik, tetapi juga memerlukan faktor lain untuk meningkatkan efisiensi melalui pengembangan kemampuan dan keterampilan manusia. Investasi dalam pendidikan membantu individu untuk memahami, mengadopsi, dan menciptakan inovasi baru. Di sisi lain, investasi di sektor kesehatan dapat meningkatkan kapasitas kerja dan daya

tahan terhadap tekanan, yang pada gilirannya berdampak langsung pada produktivitas tenaga kerja.

Pengembangan teori ini kemudian diteruskan oleh Becker (1962) yang menguraikan bagaimana investasi dalam bentuk pelatihan kerja, pendidikan, serta kesehatan fisik dan mental mempengaruhi pendapatan individu. Sebagian besar investasi pada modal manusia akan meningkat seiring bertambahnya usia, karena keuntungan itu diakumulasikan dengan pendapatan di masa tersebut, sementara pada usia yang lebih muda, biaya dapat mengurangi pendapatan yang diterima saat ini. Efek umum ini timbul dari jenis-jenis modal manusia yang sangat bervariasi, menciptakan landasan untuk teori yang lebih terpadu dan kuat. Analisis dimulai dengan membahas jenis modal manusia tertentu, dengan perhatian terbesar diberikan pada pelatihan di tempat kerja karena dapat secara jelas menggambarkan dan menyoroti efek umum yang berlaku dalam berbagai konteks. Teori ini memiliki berbagai implikasi penting, termasuk perbedaan pendapatan antara individu dan daerah, serta perbedaan pendapatan yang dipengaruhi oleh usia.

Dalam perkembangan teori ekonomi modern, *Human Capital* menjadi faktor kunci dalam Teori Pertumbuhan Endogen. Teori ini menguraikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi dari dalam sistem ekonomi melalui peningkatan mutu sumber daya manusia, tanpa terlalu mengandalkan faktor eksternal seperti modal fisik atau teknologi dari luar. Pendidikan berkontribusi dalam memperbaiki kemampuan individu untuk menggunakan teknologi, berinovasi, dan meningkatkan efisiensi dalam produksi.

2.1.3 Laju Pertumbuhan Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah minimum merupakan batasan gaji terendah yang ditentukan oleh pemerintah untuk memastikan kesejahteraan para pekerja. Menurut teori Keynesian, kenaikan gaji akan meningkatkan kemampuan beli masyarakat, sehingga permintaan keseluruhan meningkat dan memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, jika peningkatan gaji tidak sejalan dengan produktivitas tenaga kerja, hal tersebut dapat menyebabkan inflasi biaya dan mengurangi daya saing industri. Peningkatan upah minimum yang tidak diimbangi dengan kenaikan produktivitas dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja dan mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi, yang termasuk di dalamnya pengurangan jumlah karyawan (Devi *et al.*, 2024). Laju pertumbuhan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menunjukkan perubahan atau peningkatan nilai upah minimum dari waktu ke waktu. Penting untuk menganalisis laju pertumbuhan UMK guna memahami dinamika perkembangan kebijakan tentang upah serta pengaruhnya terhadap keadaan ekonomi daerah. Stabilitasnya pertumbuhan upah minimum dapat meningkatkan kemampuan beli masyarakat, memperbaiki kesejahteraan angkatan kerja, serta mendorong kegiatan ekonomi di suatu daerah. Sebaliknya, pertumbuhan upah yang terlalu rendah bisa mengurangi kesejahteraan pekerja, sementara pertumbuhan yang berlebihan dapat memberikan tekanan pada dunia usaha (Suryahadi, Widyanti, dan Sumarto, 2013) dalam (Ramadhan & Juanda, 2021).

Pemerintah menetapkan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi.

Upah minimum dibagi menjadi:

1. Upah minimum yang didasarkan pada wilayah provinsi atas kabupaten/kota. Besar upah ini untuk tiap-tiap wilayah provinsi atau kabupaten/kota tidak sama, tergantung pada nilai kebutuhan hidup layak (KHL) di daerah yang bersangkutan. KHL merupakan standar kehidupan yang harus terpenuhi oleh seorang pekerja untuk dapat hidup layak secara fisik, nonfisik dan sosial.
2. Upah minimum yang didasarkan pada sektor/sub sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum sektoral ditetapkan berdasarkan kelompok usaha tertentu contohnya seperti kelompok usaha manufaktur dan nonmanufaktur.

Teori Upah Efisiensi (*Efficiency Wage Theory*) menjelaskan bahwa perusahaan memberikan gaji lebih tinggi dari standar pasar untuk meningkatkan kinerja kerja, menurunkan angka keluar masuknya karyawan, dan menarik individu berbakat. Teori ini berkaitan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) karena tingkat gaji yang lebih tinggi dapat berfungsi sebagai upah efisiensi, di mana karyawan terdorong untuk menghindari pemecatan demi mempertahankan pekerjaan dengan gaji yang baik, sehingga kinerja kerja meningkat (Kusuma & Hasim, 2025). Pendekatan Keynes menyoroti bahwa upah nominal yang tidak fleksibel menyebabkan pengangguran, sehingga kebijakan upah minimum seperti UMK bisa meningkatkan permintaan total melalui kenaikan daya beli para pekerja. Keynes menentang pandangan tradisional yang beranggapan bahwa upah

minimum selalu menciptakan pengangguran; sebaliknya, peningkatan UMK dapat mendukung pengeluaran konsumsi dan pertumbuhan ekonomi jika disertai dengan dorongan fiskal.

Laju pertumbuhan UMK dihitung untuk melihat persentase perubahan UMK dari tahun sebelumnya. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$LPU_t = \frac{UMK_t - UMK_{t-1}}{UMK_{t-1}} 100\%$$

Keterangan:

LPU_t = Laju Pertumbuhan UMK pada tahun t (dalam persen)

UMK_t = Upah Minimum Kabupaten/Kota pada tahun t

UMK_{t-1} = Upah Minimum Kabupaten/Kota pada tahun sebelumnya ($t-1$)

2.1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah individu yang berada dalam rentang usia kerja, termasuk mereka yang sedang bekerja, memiliki pekerjaan tetapi tidak aktif (seperti karena cuti atau sakit), serta pengangguran. TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) menunjukkan ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja, baik yang sedang mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja. Tingkat partisipasi ini dapat dihitung untuk semua tenaga kerja yang ada atau berdasarkan kelompok tertentu seperti desa-kota, tingkat pendidikan, atau jenis kelamin (Rahmani, 2021) dalam (Ashari & Athoillah, 2023). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase dari populasi usia kerja yang secara aktif berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, termasuk individu yang memiliki pekerjaan maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan.

Indikator ini berfungsi untuk mengevaluasi seberapa besar bagian penduduk usia produktif yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian suatu daerah. TPAK tidak hanya menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ada, tetapi juga mencerminkan kegiatan ekonomi dan penggunaan sumber daya manusia di suatu wilayah (Syamsuddin *et al.*, 2021).

Adapun rumus TPAK sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja}} 100\%$$

Keterangan:

Angkatan Kerja = Jumlah penduduk yang bekerja + pengangguran (yang sedang mencari kerja)

Penduduk Usia Kerja = Penduduk berumur 15-64 tahun

Teori penawaran tenaga kerja (*Labor Supply Theory*) memberikan penjelasan mengenai pilihan individu dalam menentukan seberapa banyak tenaga kerja yang mereka tawarkan di pasar kerja. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan ini meliputi besaran upah, keinginan untuk waktu luang, serta keadaan ekonomi yang dialami oleh individu. Dalam kajian ekonomi tenaga kerja, dikatakan bahwa individu akan membagi waktunya antara bekerja dan menikmati waktu luang untuk mencapai utilitas maksimal. Kenaikan upah dapat menghasilkan dua dampak, yakni efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi muncul ketika peningkatan upah mendorong individu untuk berlomba-lomba menambah jam kerja karena bekerja menjadi lebih menguntungkan daripada bersantai, sedangkan efek pendapatan terjadi ketika kenaikan pendapatan

membuat individu merasa cukup dan memilih untuk mengurangi jam kerja (Renaud dan Siegers, 1984) dalam penelitian (Stepanok, 2024). Keputusan mengenai penawaran tenaga kerja juga bisa dipengaruhi oleh situasi di pasar kerja dan kebijakan perusahaan yang menentukan jumlah jam kerja yang bisa diakses oleh para pekerja (Davis, 2024). Aspek-aspek seperti perubahan dalam kondisi ekonomi, kemajuan teknologi, dan karakteristik demografis juga berpengaruh pada pilihan individu dalam memberikan tenaga kerja di pasar kerja (Vinokurov, 2023). Penawaran tenaga kerja tidak hanya tergantung pada tingkat gaji, tetapi juga pada dinamika pasar tenaga kerja dan perubahan keadaan ekonomi secara keseluruhan.

2.1.5 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan jenis pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah lokal dalam jangka waktu tertentu untuk mendanai beragam aktivitas administrasi, layanan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, serta program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah, belanja ini menunjukkan bagaimana sumber daya keuangan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan sumber lain dalam APBD digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung kemajuan daerah (Adhim *et al.*, 2024).

Belanja daerah adalah alat utama dalam kebijakan fiskal di tingkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengeluaran daerah mencakup semua biaya dari rekening kas umum daerah yang mengurangi jumlah kekayaan dan tidak akan dikembalikan oleh

pemerintah daerah. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, belanja daerah dijelaskan sebagai tanggung jawab yang diakui oleh pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pengurang nilai aset bersih dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Dengan kata lain, belanja daerah menunjukkan dedikasi pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta sosial di daerah tersebut.

Teori desentralisasi fiskal menjelaskan mengenai distribusi kekuasaan dalam pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan dari desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan publik dan memacu pembangunan ekonomi daerah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Menurut Wallace E. Oates dalam bukunya *Fiscal Federalism* (1972) dalam penelitian (Pandoyo, 2024), desentralisasi fiskal merupakan proses pemindahan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar alokasi sumber daya bisa dilakukan dengan lebih efisien berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Desentralisasi fiskal yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang pada gilirannya mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Wahyudi *et al.*, 2023).

Dalam pandangan Richard A. Musgrave (1959) dalam Novita & Pratama (2023), ada tiga fungsi utama pemerintah dalam sistem keuangan publik yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam hal desentralisasi fiskal, fungsi

alokasi bisa lebih banyak diurus oleh pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan penyediaan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat lokal. Sementara itu, fungsi stabilisasi ekonomi makro biasanya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat berhubungan dengan kebijakan nasional, seperti pengendalian inflasi dan kebijakan moneter.

Model dasar pendapatan nasional menurut Keynes dirumuskan sebagai:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Di mana Y merupakan output ekonomi atau PDRB, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, serta $(X - M)$ merupakan ekspor neto. Dalam penelitian ekonomi regional, komponen yang paling relevan adalah pengeluaran pemerintah atau belanja daerah sebagai bagian dari komponen G, sehingga peningkatan belanja daerah akan mendorong peningkatan output ekonomi wilayah. Selain itu, teori Keynesian juga menjelaskan adanya efek pengganda (*multiplier effect*), yaitu dampak lanjutan dari peningkatan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan output ekonomi yang dirumuskan sebagai:

$$\Delta Y = k \times \Delta G$$

Dimana $k = \frac{1}{1 - MPC}$, di mana k merupakan nilai pengganda, ΔY adalah perubahan output atau PDRB, ΔG merupakan perubahan belanja pemerintah, dan MPC adalah kecenderungan masyarakat untuk mengonsumsi tambahan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah tidak hanya meningkatkan pendapatan secara langsung, tetapi juga menimbulkan peningkatan

aktivitas ekonomi secara berkelanjutan melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Belanja daerah mencakup segala biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan operasional, investasi, dan proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga. Pengeluaran ini terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung yang meliputi gaji karyawan, pembangunan fasilitas umum, dan program-program sosial (UU No. 33 Tahun 2004).

2.1.6 Elastisitas

Secara umum, elastisitas merupakan ukuran sejauh mana suatu variabel berubah ketika variabel lain mengalami perubahan, diukur dalam persentase. Adapun elastisitas yang terbagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Elastisitas Permintaan

Elastisitas permintaan merupakan konsep yang mengukur sejauh mana perubahan jumlah barang yang diminta oleh konsumen akibat adanya perubahan harga, pendapatan, atau harga barang lain. Sesuai dengan hukum permintaan, semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah yang diminta akan semakin sedikit, sehingga elastisitas harga permintaan umumnya bernilai negatif. Adapun macam macam elastisitas permintaan yang terdiri dari:

- a. Permintaan inelastis, permintaan dapat dikatakan inelastis apabila $\epsilon < 1$.
- b. Permintaan elastis, permintaan dapat dikatakan inelastis apabila $\epsilon > 1$.
- c. Permintaan *unitary*, permintaan dapat dikatakan inelastis apabila $\epsilon = 1$.
- d. Permintaan inelastis sempurna, permintaan dapat dikatakan inelastis apabila $\epsilon = 0$.

- e. Permintaan elastis sempurna, permintaan dapat dikatakan inelastis apabila $\square = \infty$

2. Elastisitas Penawaran

Elastisitas penawaran mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan produsen ketika terjadi perubahan harga. Adapun macam macam elastisitas penawaran yang terdiri dari:

- a. Penawaran inelastis, penawaran dapat dikatakan inelastis apabila nilai koefisien < 1 .
- b. Penawaran elastis, penawaran dapat dikatakan inelastis apabila nilai koefisien > 1 .
- c. Permintaan *unitary*, penawaran dapat dikatakan inelastis apabila nilai koefisien $= 1$.
- d. Penawaran inelastis sempurna, penawaran dapat dikatakan inelastis apabila nilai koefisien $= 0$.
- e. Penawaran elastis sempurna, penawaran dapat dikatakan inelastis apabila nilai koefisien $= \infty$

Gujarati (2022) menyatakan bahwa pada model log-linear, koefisien regresi dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas, sehingga memungkinkan kita untuk mengetahui persentase perubahan variabel dependen akibat kenaikan satu persen pada variabel independen. Dengan demikian, elastisitas tidak hanya merupakan konsep dalam teori mikroekonomi, tetapi juga secara nyata diterapkan dalam analisis regresi di dunia praktis. Adapun bentuk elastisitasnya, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 1) \quad \beta_1 &= \frac{\Delta \text{LogY}}{\Delta \text{LogX}_1} \\
 2) \quad \beta_2 &= \frac{\Delta \text{LogY}}{\Delta X_2} \\
 3) \quad \beta_3 &= \frac{\Delta \text{LogY}}{\Delta \text{LogX}_3} \\
 4) \quad \beta_4 &= \frac{\Delta \text{LogY}}{\Delta \text{LogX}_4}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Elastisitas variabel terikat terhadap variabel bebas

δ : Persentase perubahan variabel

LogY : Variabel terikat

$\text{LogX}_1, X_2, \text{LogX}_3, \text{LogX}_4$: Variabel bebas

2.17 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian ini didasari oleh beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini dilakukan, antara lain:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tisa Zindy Meilinna, Vina Sholiha Alfunnuria, Yosi Emilia Safira, Moh. Khasbil Aziz Kholid (2024) “Pengaruh usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia”	Menganalisis rata-rata lama sekolah sebagai variabel dependen	Menganalisis variabel independen Indeks Pembangunan Manusia dan variabel dependen Usia Harapan Hidup, Pengeluaran Per Kapita	Variabel rata- rata lama sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Barat 2017-2022	Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EBISMEN) Vol 3. No. 1 Maret 2024 E-ISSN : 2962- 7621
2.	Ghaly Rizquillah Ahrizal (2022) “Analisis PDRB 34 Provinsi di Indonesia pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo”	Menganalisis variabel Rata- Rata Lama Sekolah sebagai variabel dependen terhadap	Variabel dependen tenaga kerja, indeks pembangunan teknologi, informasi, dan komunikasi, penanaman modal dalam negeri	Variabel pendidikan, variabel tenaga kerja, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk domestik regional bruto	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 6, No. 3, Agustus 2022, pp. 396~408
3.	Diana Wijayanti, Ega Nanda Laksono (2024) “Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Kota Provinsi Lampung	Menganalisis variabel belanja daerah sebagai variabel dependen terhadap produk domestik regional bruto	Variabel dependen jumlah penduduk, dana alokasi umum	Variabel belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten Kota Provinsi Lampung tahun 2017 - 2021	Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Vol. 3, No. 1 2024

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	tahun 2017 – 2021”				
4.	Aprilia Fajriyanti, Annis Nurfitriana Nihayah (2025) “Analisis Pengaruh Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”	Menganalisis variabel rata- rata lama sekolah terhadap produk domestik regional bruto	Menganalisis variabel dependen umur harapan hidup, jumlah penduduk	Variabel pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Jurnal Maneksi (<i>Management Ekonomi Dan Akuntansi</i>) e-ISSN: 2597- 4599 Vol. 14, No.4, DOI: https://doi.org/10.31959/jm.v14i4.3445 Page: 1903- 1915
5.	Yosef Felix Sitorus, Masruri Muchtar, Pardomuan Robinson Sihombing (2024) “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Kesehatan terhadap PDRB Per Kapita di Indonesia”	Menganalisis variabel rata- rata lama sekolah terhadap produk domestik regional bruto	Menganalisis variabel angka melek huruf, angka harapan hidup	Rata-rata Lama Sekolah memiliki pengaruh yang signifikan dan berbanding lurus terhadap Produk Domestik Regional Bruto per Kapita.	<i>Journal of Law, Administration, and Social Science</i> Volume 4 No. 1, 2024
6.	Maul Lydia Nurchayani Kurniawan, Ninie Imaningsih (2025) “Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, Rata- Rata Lama Sekolah, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Gresik	Menganalisis variabel upah minimum dan rata-rata lama sekolah terhadap produk domestik regional bruto	Menganalisis variabel dependen tingkat partisipasi angkatan kerja	Variabel UMK dan rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Gresik. Selain itu, variabel UMK berpengaruh signifikan, variabel rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh	<i>JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL</i> Volume 7 No. 1 January Tahun 2025. E-ISSN: 2656- 4378 P-ISSN: 2655-5689 https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/index

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan Lamongan”			signifikan terhadap PDRB Kabupaten Lamongan	
7.	Bothy Dewandaru, Sudjiono, Nining Purnamaningsih, Nunung Susilaningsih (2022) “Pengaruh Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Kediri Periode Tahun 2015-2019”	Menganalisis variabel independen Produk Domestik Regional Bruto	Menganalisis variabel dependen industri pengolahan	Variabel industri pengolahan berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kediri.	Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) Vol. 10 No. 2 (2022)
8.	Hanna Khairunnida, Yuni Prihadi Utomo (2024) “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2010-2023”	Menganalisis variabel upah minimum dan belanja daerah terhadap produk domestik regional bruto	Menganalisis variabel penanaman modal dalam negeri, indeks pembangunan manusia dan kemandirian keuangan daerah	Variabel Upah Minimum Provinsi dan Belanja Daerah memiliki dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto.	Menara Ekonomi ISSN : 2407-8565 E-ISSN: 2579-5295 Volume X, No. 1 – Oktober 2024
9.	Wahyuni Siregar, Fani Inka Prilia, Fatimah, Asnidar (2025) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah dan Kemiskinan pada Pertumbuhan Ekonomi di	Menganalisis pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen	Menganalisis variabel pajak daerah kemiskinan	Variabel PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo pada periode 2013-2024	Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi Volume 3, Nomor 1, Tahun 2025 e-ISSN: 2985-5918; p-ISSN: 2985-590X, Hal 368-388

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gorontalo”					
10.	Chindi Rizki Aulya (2025) “Analisis Pengaruh Rata- Rata Lama Sekolah Terhadap Pdrb Per Kapita Provinsi Di Indonesia Tahun 2022”	Menganalisis variabel rata- rata lama sekolah terhadap produk domestik regional bruto	-	Variabel Rata- Rata Lama Sekolah (RLS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita.	Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi Vol 17, No 10, Tahun 2025 Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v 1i2.359
11.	Liqa Auliana, Chairul Sa’roni Program (2023) “Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan Paritas Daya Beli Terhadap PDRB di Kalimantan Selatan”	Menganalisis variabel rata- rata lama sekolah terhadap produk domestik regional bruto	Menganalisis variabel dependen angka harapan hidup dan paritas daya beli	Variabel rata- rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Kalimantan Selatan	JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 6, No. 2, 2023, hal 986-994
12.	Dina Hidayat, Nirdukita Ratnawati, Sayfri (2025) “Pengaruh indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk terhadap produk regional domestik bruto di Provinsi Riau Tahun 2010- 2022”	Menganalisis variabel independen produk domestik regional bruto	Menganalisis variabel dependen indeks pembangunan manusia (IPM) dan jumlah penduduk	Variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan, jumlah penduduk menunjukkan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap PDRB.	Jurnal Ekonomi Kiat Volume 35, Issue 1, 2025

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Muhamad Gentar, Intan Permatasari, Wildan Kautsar (2024) “Dinamika Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten: Analisis Data Triwulanan 2018- 2022”	Menganalisis variabel independen produk domestik regional bruto	Menganalisis variabel dependen Inflasi, intermediasi perbankan, pengeluaran anggaran daerah	Variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten cenderung meningkat dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dan regional di Pulau Jawa, meskipun masih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti inflasi, intermediasi perbankan, dan belanja APBD.	<i>Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)</i> e-ISSN: 2686- 2557 DOI: 10.21512/becossj ournal.v6i1.10943
14.	Rafi Taufiq Ashari, Moh. Athoilah (2023) “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kawasan Tapal Kuda”	Menganalisis variabel dependen Tingkat partisipasi Angkatan kerja, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi	Menganalisis variabel Tingkat pengangguran terbuka, indeks Pembangunan manusia, dan jumlah penduduk	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kawasan Tapal Kuda.	<i>Journal Of Development Economic And Social Studies Volume 2 No 2 Tahun 2023</i>

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Muhammad Aflakhul Adhim, Maya Widyana Dewi, Yuwita Ariessa Pravasanti (2024) “Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah terhadap Laju Pertumbuhan PDRB (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2016-2018)	Menganalisis variabel belanja daerah terhadap laju pertumbuhan PDRB	Menganalisis variabel dependen pendapatan daerah dan pembiayaan daerah	Belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode 2016-2018	<i>Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis</i> 2024; 3(2): 540-550 doi: https://doi.org/10.53088/jikab.v3i2.85 ISSN: 2962-2433 <i>Analisis</i>

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat didefinisikan sebagai konsep yang didasari oleh teori, fakta, observasi, serta hasil penelitian literatur. Dengan demikian, kerangka pemikiran tidak hanya mencakup orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Selain itu, kerangka pemikiran tidak hanya sekadar menghitung jumlah dalam cara yang masuk akal, tetapi juga membantu dalam menyusun hipotesis, menganalisis data, serta memahami fenomena yang diteliti:

2.2.1 Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah dengan Produk Domestik Regional Bruto

Teori modal manusia yang menekankan bahwa investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Teori ini, yang dirumuskan oleh Theodore W. Schultz dan Gary S. Becker pada tahun 1950-an hingga 1960-an, menempatkan pendidikan sebagai bentuk akumulasi modal manusia yang lebih penting dibandingkan modal fisik, karena menghasilkan keterampilan serta pengetahuan yang mendukung inovasi dan efisiensi dalam produksi. Dalam perspektif ini, peningkatan RLS secara langsung berkontribusi pada PDRB melalui peningkatan hasil per pekerja, seperti yang diungkapkan Becker bahwa imbal hasil dari investasi pendidikan lebih tinggi dibandingkan modal fisik dalam menjelaskan pertumbuhan pendapatan (Aulya, 2025).

Penelitian Sitorus *et al.* (2024) memiliki dampak yang signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Maka peningkatan pendidikan di sektor lama waktu sekolah akan meningkatkan nilai Produk Domestik Regional Bruto per Kapita. Sebaliknya, penelitian oleh Kurniawan & Imaningsih (2025) menemukan bahwa variable rata-rata lama sekolah negatif dan tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten Gresik dikarenakan terdapat perbedaan variabel yang berpengaruh antara kedua daerah yang memiliki sektor unggulan yang berbeda.

Berdasarkan *Human capital theory* dan hasil-hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi dalam sektor pendidikan akan memperbaiki

mutu tenaga kerja sehingga produktivitasnya bertambah. Pekerja yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik biasanya lebih mampu mengadopsi teknologi, meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan, serta menghasilkan inovasi yang membantu perkembangan ekonomi di daerah.

2.2.2 Hubungan Laju Pertumbuhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan Produk Domestik Regional Bruto

Teori Efisiensi Upah menjelaskan bahwa kenaikan gaji yang diberikan kepada karyawan dapat mendorong produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan hasil ekonomi. Ide ini pertama kali banyak dibahas oleh ekonom seperti George A. Akerlof dan Janet L. Yellen, yang mengemukakan bahwa perusahaan sering memberikan gaji di atas rata-rata pasar untuk mendukung performa dan efisiensi karyawan. Gaji yang lebih tinggi dapat memotivasi pekerja untuk bekerja lebih keras, mengurangi angka ketidakhadiran, serta menekan tingkat perputaran tenaga kerja. Situasi ini akan memperbaiki produktivitas karyawan yang pada akhirnya dapat mendongkrak hasil produksi perusahaan dan sektor ekonomi secara keseluruhan (Pertama & Miati, 2024).

Penelitian Khairunnida & Utomo (2024) berpendapat upah minimum berdampak positif signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri demi menumbuhkan ekonomi, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mempertahankan kestabilan elemen-elemen ekonomi yang berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Memperbaiki kualitas tenaga kerja agar sejalan dengan struktur ekonomi dan tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi, serta

meningkatkan efisiensi kerja, juga penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan penelitian Kurniawan & Imaningsih (2025) berpendapat bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan Teori Efisiensi Upah dan hasil-hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peningkatan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) biasanya berujung pada peningkatan penghasilan pekerja yang berimbas pada daya beli masyarakat. Kenaikan dalam konsumsi rumah tangga tersebut mampu memicu meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya akan merangsang aktivitas produksi serta output ekonomi suatu daerah yang dapat terlihat dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan kata lain, peningkatan upah minimum dapat memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara meningkatkan konsumsi dan aktivitas ekonomi.

2.2.3 Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan Produk Domestik Regional Bruto

Teori *Labor Supply Theory* menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk terjun ke dunia kerja atau tidak bergantung pada faktor-faktor ekonomi, seperti upah yang ditawarkan, peluang kerja yang ada, dan situasi di pasar kerja. Ketika partisipasi angkatan kerja meningkat, jumlah orang yang berada dalam usia kerja yang siap untuk bekerja juga bertambah, yang berarti ketersediaan tenaga kerja dalam sektor produksi jadi lebih tinggi (Mulyani *et al.*, 2023). Dalam konteks teori

penawaran tenaga kerja, peningkatan dalam partisipasi angkatan kerja menunjukkan bertambahnya jumlah orang yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Bertambahnya tenaga kerja ini dapat meningkatkan kapasitas produksi suatu daerah karena lebih banyak individu yang terlibat dalam proses pembuatan barang dan jasa. Dengan bertambahnya aktivitas produksi, nilai tambah yang terbentuk dalam ekonomi juga akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Sinaga *et al.*, 2025).

Penelitian yang dilakukan (Novita & Samsuddin, 2024) berpendapat tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Bali. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, maka semakin besar kontribusi tenaga kerja terhadap aktivitas produksi sehingga mampu meningkatkan output ekonomi daerah. Sedangkan penelitian (Adamy *et al.*, 2024) berpendapat bahwa Tingkat partisipasi Angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Berdasarkan Teori Penawaran Tenaga Kerja, kenaikan TPAK menunjukkan bahwa lebih banyak orang dalam kelompok usia kerja terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik dengan cara bekerja maupun mencari pekerjaan. Semakin banyak tenaga kerja yang ada di pasar tenaga kerja, semakin besar pula potensi sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk proses produksi barang dan jasa. Bertambahnya jumlah tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi akan

meningkatkan kemampuan produksi suatu wilayah. Dengan bertambahnya kegiatan produksi, nilai yang dihasilkan dalam perekonomian juga akan meningkat. Akhirnya, hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang terlihat melalui bertumbuhnya nilai Produk Domestik Regional Bruto.

2.2.4 Hubungan Belanja Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto

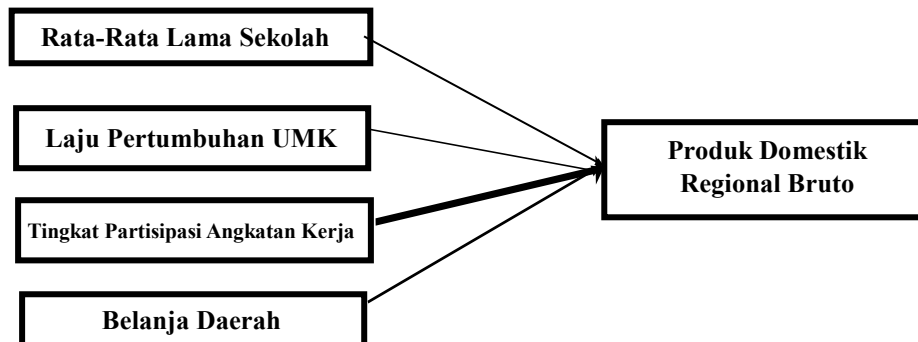
Teori Fiskal Keynesian menyatakan bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan anggaran, terutama dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah. Menurut perspektif Keynesian, ketika pemerintah meningkatkan belanja publik, permintaan keseluruhan akan melonjak, yang selanjutnya akan meningkatkan produksi, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks wilayah, pengeluaran pemerintah di daerah berfungsi sebagai rangsangan fiskal yang dapat memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat regional. Kebijakan belanja daerah tidak terlepas dari pengaruh ekonomi global yang berdampak pada ekonomi lokal. Berbagai permasalahan seperti fluktuasi harga barang, perubahan iklim, dan krisis ekonomi dunia dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan belanja. Sebagai contoh, peningkatan harga bahan mentah akibat ketidakstabilan di pasar global dapat meningkatkan biaya proyek infrastruktur, yang pada akhirnya dapat mengurangi dana yang dialokasikan untuk sektor lain yang juga penting bagi pertumbuhan ekonomi (Adhim *et al.*, 2024).

Beberapa studi terbaru menunjukkan adanya hubungan yang positif antara belanja daerah dan PDRB. Penelitian yang dilakukan oleh Lakat *et al.* (2025) mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah di berbagai area di

Indonesia memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Selanjutnya, penelitian yang oleh Sugandi *et al* (2024) di Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa kebijakan belanja daerah memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan PDRB daerah. Temuan dari penelitian lainnya juga memperlihatkan bahwa beberapa elemen dari belanja daerah tertentu memiliki keterkaitan positif dengan peningkatan *output* di tingkat regional, meskipun dampaknya bisa bervariasi tergantung pada tipe belanja yang dianggarkan.

Namun, temuan yang berbeda ditemukan oleh Primasari & Suharsih (2024) yang mengungkapkan bahwa sejumlah elemen belanja daerah malah berpengaruh negatif terhadap PDRB, terutama ketika distribusi anggaran lebih banyak diarahkan pada pengeluaran yang bersifat konsumtif dan kurang berkontribusi pada produktivitas. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran daerah tidak selalu memberikan efek positif pada hasil ekonomi jika tidak didukung oleh pengelolaan anggaran yang baik.

Berdasarkan *Keynesian Fiscal Theory* dan hasil-hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja daerah dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan, penyediaan infrastruktur, dan layanan publik di suatu daerah. Kenaikan belanja daerah mampu mendorong kegiatan ekonomi melalui peningkatan permintaan barang dan layanan, penambahan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil ekonomi daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Uji Hipotesis

Berdasarkan pada permasalahan, pemikiran yang mendasari, dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial rata-rata lama sekolah, laju pertumbuhan upah minimum kabupaten/kota, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan belanja daerah berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten/Kota Priangan Timur tahun 2011-2024.
2. Diduga secara bersama-sama rata-rata lama sekolah, laju pertumbuhan upah minimum kabupaten/kota, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan belanja daerah berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten/Kota Priangan Timur tahun 2011-2024.